



Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara Oleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2017

Jakarta, 12 September 2017 – Hari ini berlangsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) Tahun 2017 dengan mengusung tema “Kerja Bersama APIP melalui Pengawasan Isu Strategis Pengawasan Penerimaan Negara”. Acara ini dilaksanakan sebagai sarana komunikasi/pertemuan antar seluruh APIP K/L/D untuk menyelaraskan pemahaman APIP tentang pengawasan terhadap Penerimaan Negara. Rakernas bertujuan untuk (1) mengembangkan pengetahuan dan kapasitas APIP K/L/D terhadap pengawasan PNB; (2) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar APIP K/L/Daerah dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara; dan (3) memperoleh kesepahaman APIP K/L/D untuk membantu pengawasan penerimaan negara.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah (Pusat dan Daerah) dibantu oleh APIP K/L/D untuk mengawasi penerimaan negara antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak atas belanja pemerintah (K/L dan Pemda) serta PNB. Pengelolaan penerimaan pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang salah satu sumbernya berasal dari setoran Bendahara Pemungut atas belanja negara, sedangkan pengelolaan PNB dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang memiliki sumber PNB. Salah satu contoh penerimaan PNB yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada di sektor migas. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga turut ambil bagian dalam mengawal PNB yang bersumber dari sektor mineral dan batubara mengingat adanya kewenangan Pemerintah Daerah yang bersinggungan dengan PNB, antara lain terkait Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Kehutanan, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Rakernas diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, dibuka oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP. Peserta rapat kerja nasional berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/D sebanyak 700 orang, meliputi 71 K/L dari 34 Provinsi dan 166 Kabupaten.

Hasil Rakernas ini diharapkan dapat (1) meningkatkan pemahaman APIP K/L/D terhadap pengawasan atas pengelolaan PNB dan penerimaan negara yang berasal dari Pajak yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran; (2) terciptanya pengawasan yang efektif melalui sinergi antar APIP K/L/D dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara; serta (3) menyelaraskan kesepahaman APIP K/L/D atas pengawasan PNB dalam bentuk penandatanganan *Letter of Commitment* (LoC); serta (4) langkah awal dari perwujudan rencana pembentukan Forum APIP K/L/D terkait PNB.

Setelah kegiatan Rakernas APIP K/L/D ini, Kementerian Keuangan akan mengadakan *Workshop* pada tanggal 13 September 2017 yang diselenggarakan untuk Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam rangka mempersiapkan APIP untuk menyongsong era digital yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui *e-government*.

Info lebih lanjut hubungi

Inspektorat V
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Juanda II lantai 9
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3456545
Situs: www.itjen.kemenkeu.go.id